

“MEMBUMIKAN” IDEOLOGI PANCASILA ERA DIGITAL

ZULY QODIR

Sosiolog Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

“Jika Pancasila hendak menjadi ideologi yang bekerja, setidaknya ada lima jalan yang harus dilakukan. Jalur revitalisasi dan reaktualisasi pemahaman; jalan inklusi social; jalan keadilan social, jalan pelembagaan dan jalan keteladanan” (Yudi Latif, 2018)

Inspiratif apa yang dikemukakan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di atas seperti saya kutipkan diawal tulisan ini. Selain inspiratif, tentu terdapat tantangan yang faktual di sana, terkait ideologi Pancasila di tanah air kita ini. Oleh karena itu perlu sebuah kerja keras dan kerja goton-royong untuk dapat “membumikan” Ideologi Pancasila tersebut sebagai dasar negara sekaligus sebagai praktek berbangsa bernegara.

Praktek Ideologi Pancasila saat ini banyak mendapatkan kritikan tajam, bahkan terdapat sekelompok orang hendak mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan lainnya. Kekuatan kelompok ini memang kecil, namun berupaya secara terus-menerus memengaruhi kelompok masyarakat lainnya (mayoritas) pendukung Pancasila untuk meninggalkan Pancasila sebagai dasar negara dengan alasan Pancasila hanyalah buatan manusia yang bisa diganti.

Pancasila bukan agama dan tidak harus disucikan seperti kitab suci demikian dikatakan. Genderang untuk mengganti Pancasila bukan kehendak main-main, sekalipun hanya sekelompok orang yang tidak setuju, sebab Pancasila merupakan kesepakatan bersama komponen bangsa sejak kemerdekaan Republik Indonesia dari kaum mayoritas (Islam) Muhammadiyah dan NU serta lainnya.

Persoalannya, bagaimana agar Pancasila “membumi” di bumi Indonesia, sehingga seluruh rakyat Indonesia betul-betul merasakan nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara menjadi milik bersama, bukan hanya milik segolongan umat saja perlu mendapatkan perhatian serius.

JALAN IDEOLOGI

Apa yang dikemukakan Yudi Latif diawal tulisan ini kiranya perlu menjadi perhatian banyak pihak. Pancasila harus menjadi ideologi yang bekerja di tengah hiruk pikuk persoalan bangsa ini. Pancasila bukan saja harus dapat menjadi lentera ditengah kegelapan, namun harus menjadi jalan penuntun dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila harus menjadi komitmen kita bersama untuk keselamatan bangsa dan negara.

Oleh sebab itu, Pancasila harus mampu menjadi ideologi publik yakni mendorong kearah terciptanya kebijakan bersama warga negara (*public good*), dalam praktek bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tanpa menjadi ideologi yang dimiliki secara massal, maka gagasan agar Pancasila menjadi ideologi yang mengayomi, menerangi serta menjadi referensi anak-anak bangsa tidak akan teraktualkan.

Kita pernah mengalami sebuah era dimana Pancasila hanya menjadi “ideologi politik” yang membunuh hak-hak politik warga negara. Ini jangan sampai terulang kembali. Berbahaya dan menistakan!

JALAN KETELADANAN

Jalan *cultural citizenship* tidak bisa ditolak kehadirannya. Inilah jalan keteladanan kewargaan yang harus terus disemaikan ditengah terik dan kekeringan jiwa berkorban sebagian warga negara dalam berbangsa dan bermasyarakat. *Cultural citizenship* merupakan nilai-nilai kultural yang tersedia di tengah warga negara sejak berdirinya negara ini.

Cultural citizenship inilah jalan keteladanan kewargaan yang harus disemaikan menjadi kebutuhan dan tradisi kebajikan bersama milik bangsa. Bukan hanya milik personal maupun kelompok. Nilai-nilai keteladanan dari warga negara harus menjadi kekayaan bersama dan terus diderivasikan ke ranah publik sehingga bangsa ini benar-benar dapat berdiri diatas kakinya sendiri sebagai watak kemandirian bangsa.

Saling mengharga dan menghormati atas sesama umat beragama adalah bentuk *cultural citizenship* yang harus terus dipelihara dan disemaikan ditengah terik panasnya hubungan sosial keagamaan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sikap inklusif, toleran dan moderat dari keagamaan di Indonesia harus terus menjadi bagian tak terpisahkan umat beragama di Indonesia.

Itulah sebenarnya watak asli umat beragama di Indonesia yang oleh Robert Hefner (2000), sebut sebagai watak keadaban warga yang demokratis (*democratic civility*) dalam berpolitik dan beragama. Watak kewargaan yang saling menghargai, menghormati, toleran terhadap perbedaan, terbuka atas perubahan dan keragaman serta tidak mendahulukan praktek kekerasan.

Sementara, ahli Hukum Islam asal Sudan, Abdullahi Ahmed An-Naim, (2009) bahkan dengan penuh keyakinan berharap praktek-praktek politik dan keagamaan, serta praktek kewargaan yang saleh akan datang dari Indonesia yang menganut mayoritas Islam. Islam Indonesia sangat diharapkan menjadi teladan dari bangsa-bangsa lain di Timur Tengah khususnya yang senantiasa bergolak antar mazhab.

An-Naim memberikan apresiasi dan empati yang dalam atas kehadiran multi mazhab, multi wajah Islam Indonesia, yang tetap memegang prinsip Islam *wasathiyah* (*Islam moderat*), sebagai kultur Islam Indonesia sejak para wali songo. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang mengharapkan hadirnya Indonesia menjadi salah satu pemimpin dunia Islam, bukan dari Timur Tengah.

Kita saat ini memiliki Pancasila sebagai dasar Negara, dimana oleh para ahli dikatakan nilai-nilai Pancasila tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam Mukhtamar ke-47 di Makassar 2015, menyatakan Negara Pancasila itu merupakan negara yang secara esensial merupakan negara yang bisa dikatakan Islami, sekalipun bukan negara Islam.

Oleh sebab itu, harapan Robert Hefner dan Abdullahi Ahmed An-Naim itu sebenarnya sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pancasila di Indonesia. Pancasila memang bukan agama maupun kitab suci. Tetapi, nilai-nilai dari tiap sila Pancasila merupakan nilai yang dapat dikatakan sama dengan nilai-nilai Islam. Nilai yang dapat diaktualkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sebuah masyarakat Islami, bukan negara Islam.

Disinilah Pancasila dibutuhkan untuk diaktualkan di ruang *public* sebagai *cultural citizenship* dan *public good* (kesalehan publik). Tanpa Pancasila dipraktekkan di ruang publik maka yang akan terjadi adalah hadirnya kritik yang keras atas ideologi Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, karena dianggap sama dengan jenis ideologi-ideologi politik lainnya yang ada di muka bumi seperti liberalisme, kapitalisme bahkan sosialisme-komunisme.

Kita tentu tidak berharap Pancasila disamakan dengan ideologi-ideologi politik mutakhir tersebut, sebab seperti Bung Karno (Sang Proklamator) kemukakan di hadapan Dewan PBB tahun 1960, bahwa Pancasila itu bukan komunisme, sosialiasme, liberalisme, kapotalisme tetapi suatu ideologi yang diambil dari Rahim bangsanya sendiri yakni rakyat Indonesia yang telah tumbuh dan berjalan sejak ratusan tahun sebelum Indonesia itu merdeka.

Pancasila dan Islam tidak ada satupun yang bertentangan. Bahkan, jika boleh dikatakan semua sila Pancasila, sebenarnya merupakan nilai-nilai yang diambil dari ajaran etika Islam. Kita perhatikan sila Pertama, tentang Ketuhanan, memberikan keternagan bahwa semua umat manusia sejatinya Bertuhan, dengan berbagai nama. Tuhan dengan banyak Nama tidak menjadi masalah. Tuhan akan mencatat orang Beriman atau Bertuhan dan beramal saleh.

Sementara sila kedua, kemanusiaan merupakan esensi lain dari ajaran Islam khususnya, yakni untuk menghargai dan menghormati kemanusiaan manusia apapun agamanya. Manusia akan dilihat oleh Tuhan karena amal saleh dan keimanannya pada Tuhan bukan karena suku, etnis, ataupun jenis kelaminnya. Tuhan memposisikan setara semua umat manusia kecuali amal salehnya.

Sila ketiga tentang persatuan. Dalam Islam terdapat ajaran antar sesama manusia sekalipun berbeda dan beragama tidak saling bermusuhan dan membenci. Kita supra Bersatu antara umat yang satu dengan lainnya sekalipun berbeda suku dan agama. Kita telah diciptakan Tuhan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal sekaligus saling membantu-menolong.

Sila keempat, musyawarah mufakat. Sila ini mengisyaratkan agar semua urusan duniawi itu dapat dimusyawarahkan dengan semua warga masyarakat tidak dengan jalan kekerasan. Dialog adalah musyawarah yang diajarkan Tuhan untuk mencapai kebaikan. Kita supaya bersepakat dalam kebajikan untuk menuju martabat umat manusia. Bersepakat dalam kejahatan dan kebencian.

Sila kelima, keadilan. Inilah tujuan semua ajaran agama disampaikan para nabi. Demikian pula ajaran islam menempatkan keadilan sebagai hal yang utama dari semua ajaran. Seorang yang berbuat adil adalah orang yang sesungguhnya Iman kepada Tuhan karena menempatkan semua manusia dalam derajat yang sama sesuai dengan kedudukan sebagai manusia tanpa memandang kelas social, agama, suku, etnis dan jenis kelamin.

Mari kita renungkan bersama kehadiran Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila tidak boleh hanya menjadi jargon. Pancasila tidak bisa hanya menjadi lambang (symbol), tetapi Pancasila harus hadir di tengah masyarakat menjadi daya dorong, daya gerak, dan inspirasi untuk hadirnya *cultural citizenship* dan *public good* sehingga menjadi milik semua warga negara, bukan hanya satu golongan saja. Pancasila harus menjadi ideologi yang hidup dan menghidupkan.

TANTANGAN IDEOLOGI PANCASILA

Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi bersama menyangkut nilai-nilai dan haluan dasar bagi keberlangsungan, keutuhan dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Seorang cencekiawan Amerika Serikat, John Gardner, mengingatkan, “Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar.”

Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi (cita) mengenai hakikat yang paling dalam dari negara (cita negara/*Staatsidee*) serta konsepsi mengenai hakikat yang paling dalam dari tatanan hukum negara (cita hukum/*Rechtsidee*). Dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa Bangsa, pada 30 September 1960, yang memperkenalkan Pancasila kepada dunia, Soekarno mengingatkan pentingnya konsepsi dan cita-cita bagi suatu bangsa: “Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya” (Soekarno, 1989: 64).

Pancasila sebagai ideologi negara dapat dikatakan sebagai ideologi “integralistik” yang mengatasi partikularitas paham perseorangan dan golongan. Dalam pengertian bahwa dalam wilayah privat (keluarga) dan komunitas (etnis, agama, dan golongan masyarakat), masing-masing perseorangan dan golongan masih bisa mengembangkan partikularitas ideologinya masing-masing. Namun dalam wilayah publik kenegaraan, segala perseorangan dan golongan itu harus menganut ideologi Pancasila sebagai titik temu.

Secara historis kelima sila Pancasila merupakan perpaduan (sintesis) dari keragaman keyakinan, paham dan harapan yang berkembang di negeri ini. Sila pertama merupakan rumusan sintesis dari segala aliran agama dan kepercayaan. Sila kedua merupakan rumusan sintesis dari segala paham dan cita-cita sosial-kemanusiaan yang bersifat trans-nasional. Sila ketiga merupakan rumusan sintesis dari kebhinekaan (aspirasi-identitas) kesukuan ke dalam kesatuan bangsa. Sila keempat merupakan rumusan sintesis dari segala paham

mengenai kedaulatan. Sila kelima merupakan rumusan sintesis daripada segala paham keadilan sosial-ekonomi.

Pilar ideologis dari kelima sila tersebut utamanya ditopang oleh “trilogi ideologi” arus utama: ideologi-ideologi berhaluan keagamaan; ideologi-ideologi berhaluan kebangsaan (nasionalisme); dan ideologi-ideologi berhaluan sosialisme. Ketiga haluan ideologis tersebut, meski memiliki titik perbedaan, menemukan titik temu dalam tiga prinsip dasar: sosio-religius, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi.

Sosio-religius adalah prinsip religiositas yang bermurah hati (sosius); yang penuh welas asih dan lapang. Semangat “ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain”. Prinsip ini terkandung pada sila pertama.

Sosio-nasionalisme adalah prinsip kebangsaan yang bermurah hati (sosius); penuh welas asih dan lapang; semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan kedalam dan keluar. “Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan *chauvinisme*.... Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia.” Prinsip ini merupakan perpaduan dari sila kedua dan ketiga.

Sosio-demokrasi adalah demokrasi yang bermurah hati (sosius); penuh welas asih dan lapang; demokrasi yang berorientasi keadilan sosial, yang tidak hanya menghendaki partisipasi dan emansipasi di bidang politik, tetapi juga partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi. “Demokrasi sejati yang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik dan demokrasi-ekonomi.” Prinsip ini merupakan perpaduan dari sila keempat dan kelima.

Ketiga prinsip tersebut dipersatukan oleh semangat cinta kasih. Semangat cinta kasih itulah yang dalam kata kerjanya disebut Bung Karno dengan istilah “gotong-royong”. Menurutny, gotong-royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. “Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama!”

Dalam prakteknya sampai sekarang ini terdapat hambatan dan tantangan kebangsaan terkait penamnan nilai Pancasila sebagai ideology berbangsa dan bernegara yaitu:

1. **Tantangan Pemahaman.** Tugas ini diwujudkan dengan pendirian dan pengembangan pemahaman terhadap Pancasila. Hal ini diarahkan pada upaya-upaya dalam pembelajaran, pengkajian, pertukaran pikiran, silang inisiatif dalam praksis kehidupan dan pemerintahan. Pemahaman ini menjadi masalah yang perlu dicermati mengingat pemahaman ini berkembang seturut lingkup sosial-masyarakat, komunitas epistemik, dan tingkat kedewasaan. Dalam hal ini, pemahaman atas Pancasila perlu dikembangkan dalam upaya tanggap dan kreatif. Sekaligus, pemupukan perlu dilakukan sehingga pemahaman terhadap Pancasila dapat tumbuh sebagai taman asri kebangsaan dan kenegaraan Indonesia
2. **Tantangan Eksklusivisme, Ekstrimisme,** yang mengarah pada intoleransi. Tugas dalam hal ini adalah melalui pengembangan kewargaan inklusif dimana masing-

masing dan semua anak bangsa dapat berkontribusi terhadap kebangsaan Indonesia. Dengan mencermati terhadap tren, gejala, dan menyebarnya kehidupan eksklusif (daerahisme, sukuisme, praktek intoleran, akuisme), kewagaan inklusif ini dibangun dengan mendorong peran-peran ketokohan, organisasi, pemangku kepentingan, kelompok-kelompok untuk selalu menyelenggarakan dan mempromosikan ruang-ruang bersama. Ada upaya membangun penghargaan terhadap penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia apapun latar belakangnya, sekaligus aktif dalam perjuangan perdamaian dunia demi kemanusiaan.

3. **Tantangan kesenjangan sosial.** Tugas dalam hal ini diwujudkan dengan upaya membangun inklusi sosial dan praksis solidaritas antar dan oleh anak bangsa. Kehidupan sosial yang menghasilkan eksklusi sosial dan marjinalisasi adalah tantangan terhadap pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Eksklusi sosial dan marjinalisasi dapat menjadi sumber dan lapangan keraguan, sinisme dan apatisisme terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Upaya inklusi sosial dan solidaritas ini diperjuangkan dengan membangun kemandirian warga negara, secara sendiri dan secara bersama-sama, dan mempromosikan kemitraan dalam beragam tingkat dan lapangan sosial ekonomi. Dalam hal ini, proses pembangunan kapasitas (*capacity building*) menjadi pilar dimana kemanusiaan ini dibangun menjadi pewujudan emansipasi diri dalam kehidupan sekaligus partisipasi aktif untuk solidaritas. Pembangunan kapasitas ini diarahkan sebagai pengembangan kelompok-kelompok prakarsa masyarakat dan usaha kecil-menengah sehingga partisipasi mereka menjadi substantif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, nilai tambah dalam setiap inklusi sosial dan praktis solidaritas ini dilihat sebagai proses menuju keberadaban bangsa.
4. **Tantangan pelebagaan.** Tugas dalam hal ini diwujudkan dengan pembangunan pelebagaan Pancasila didirikan dan diupayakan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Hal ini diarahkan pada ranah kebudayaan, ranah politik, ranah ekonomi. Pelebagaan ini amat penting dalam metransformasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah habitus, sebagai sebuah penyelenggaraan negara dan partisipasi kewargaan. Pelebagaan ini dapat dicermati dalam bagaimana menilai, mengolah penyelenggaraan negara dan partisipasi warga, serta membuatnya menjadi praksis berkelanjutan. Upaya-upaya sejenis *guidance* (panduan), *indexing* (pengukuran dengan model indeks), dan pencermatan terhadap kepranataan penyelenggaraan negara dapat menjadi pendukung penting dalam proses pelebagaan tersebut.
5. **Tantangan Keteladanan.** Pancasila juga adalah keteladanan. Pancasila dapat dialami dalam praksis hidup yang dapat dilihat, dicontoh, dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Tugas dalam hal ini diwujudkan dengan membangun banyak upaya bersama, serta mendorong promosi hal-hal positif. Dalam hal ini, keteladanan adalah praktek langsung dalam Pancasila. Sekaligus, keteladanan ini diolah untuk membangun penguatan praktek-praktek positif (*positive reinforcement*). Keteladanan ini juga dibangun dengan proses apresiasi dan penghargaan pantas (*reward*). Keteladanan tidak hanya dicermati, tetapi diolah dan dipromosikan terus-menerus.

Penutup

Dalam membumikan prinsip tersebut, para pendiri bangsa telah mewariskan suatu kemampuan untuk memadukan antara visi global dengan kearifan lokal, antara kepentingan nasional dan kemanusiaan universal. Dalam visi dan misi negara sebagai cerminan kebebasan positif itu begitu jelas tergambar bahwa warisan terbaik bangsa ini bukanlah politik ketakutan (*politics of fear*), melainkan “politik harapan” (*politics of hope*). Bahwa rumah kebangsaan ini dibangun dengan penuh harapan: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Makmur untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali.